



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT REKAYASA INDUSTRI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TRIYANI UTAMININGSIH
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 253222

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 10.125.326.500

1. Tanah dan Bangunan Seluas 220 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.685.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 47.72 m2/47.72 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 121.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 334 m2/151.43 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 5.407.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/152 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 911.326.500

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 128.500.000

1. MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 39.000.000
2. MOBIL, MERCY MERCY CE 300 Tahun 1990, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOTOR, KAWASAKI KAWASAKI KLX Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 177.700.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 37.689.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 10.469.215.500

III. HUTANG

Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

10.469.215.500

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.